

**PENGARUH KOMPETENSI STAF AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS  
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

*(Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:  
MUHAMMAD IHSAN  
2008/02171**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2012**

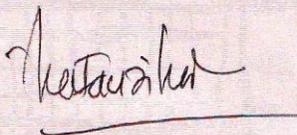
**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**  
**PENGARUH KOMPETENSI STAF AKUNTANSI TERHADAP**  
**KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**  
**(Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang)**

Nama : MUHAMMAD IHSAN  
NIM/BP : 02171/2008  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2012

**Disetujui Oleh:**

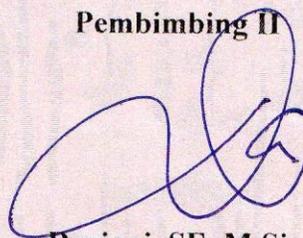
**Pembimbing I**



**Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak**

Nip. 19710522 200003 2 001

**Pembimbing II**

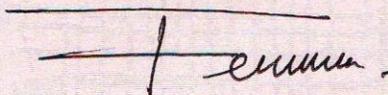


**Deviani, SE, M.Si, Ak**

Nip. 19690610 199802 2 001

**Diketahui Oleh:**

**Ketua Program Studi Akuntansi**



**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

Nip. 19730213 199903 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

**Judul** : Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang).

**Nama** : Muhammad Ihsan

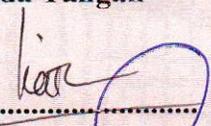
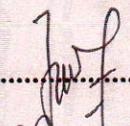
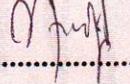
**TM/NIM** : 2008/02171

**Prog. Studi** : Akuntansi

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Juli 2012

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris Deviani, SE, M.Si, Ak	2. 
3. Anggota Lili Anita, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	4. 

## ABSTRAK

**Muhammad Ihsan (2008/02171). Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Saruan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Padang) Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.**

**Pembimbing I : Eka Fauzihardani, SE, MSi, Ak**  
**Pembimbing II : Deviani, SE, MSi, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) propinsi Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang. Maka didapat responden sebanyak 168 orang responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana dengan bantuan SPSS 16.

Kesimpulan penelitian menunjukkan: Pengaruh kompetensi staf akuntansi signifikan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $16,944 > 1,6542$ . Nilai koefisien dari variabel kompetensi staf akuntansi (X) adalah 0,621 ini berarti bahwa meningkatnya pengaruh kompetensi staf akuntansi satu satuan, maka akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah 0,621 satuan dan bentuk pengaruhnya X terhadap Y adalah positif.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi instansi pemerintah agar meningkatkan kompetensi staf akuntansi melalui pelatihan-pelatihan yang intensif. Hal ini bertujuan agar staf akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang tinggi, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. 2) Penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah dapat disertai pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam metode penelitian, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan membukakan mata hati dan fikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, MSi, Ak selaku pembimbing I, dan Ibu Deviani, SE, MSi, Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Teristimewa buat kedua Orang Tua, dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi angkatan 2008 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Juli 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II. KAJIAN TEORI. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori .....	13
1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan.....	13
a. Defenisi Kualitas Informasi Laporan Keuangan.....	13
b. Karakteristik Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
2. Kompetensi Staf Akuntansi .....	22
a. Definisi Kompetensi Staf Akuntansi.....	22
b. Klasifikasi Kompetensi.....	25
c. Kompetensi Staf Akuntansi Pemerintah Daerah.....	26
B. Penelitian Relevan.....	29
C. Pengembangan Hipotesis .....	33
D. Kerangka Konseptual.....	35
E. Hipotesis.....	39
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	40

A. Jenis Penelitian .....	40
B. Populasi dan Sampel .....	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Variabel Penelitian .....	43
1. Variabel Dependen ( <i>Y</i> ) .....	43
2. Variabel Independen( <i>X</i> ) .....	43
F. Instrumen Penelitian.....	44
G. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	46
1. Uji Validitas .....	46
2. Uji Reliabilitas .....	47
H. Teknik Analisis Data.....	49
1. Uji Asumsi Klasik	
a. Uji Normalitas Residual.....	50
b. Uji Multikolinearitas.....	50
c. Uji Heterokedastisitas.....	50
2. Uji Model.....	51
a. Uji F.....	51
b. Koefisien Determinasi yang Disesuaikan.....	51
3. Uji Hipotesis (Uji <i>t</i> ).....	52
I. Definisi Operasional .....	53
<b>BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Temuan.....	54
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
2. Demografi Responden.....	55
3. a. Jumlah Responden berdasarkan jenis kelamin.....	55
b. Jumlah Responden berdasarkan jenjang pendidikan.....	56
c. Jumlah Responden berdasarkan masa kerja.....	57
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	57

C. Analisis Deskriptif Statistik.....	61
D. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	62
1. Uji Validitas.....	62
2. Uji Reliabilitas.....	63
E. Uji Asumsi Klasik.....	64
1. Uji Normalitas Residual .....	64
F. Uji Model Penelitian.....	65
1. Uji F ( <i>F-test</i> ).....	65
2. Koefisien Determinasi.....	66
3. Analisis Regresi Sederhana.....	67
4. Uji Hipotesis (Uji-t).....	69
G. Pembahasan.....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Keterbatasan Penelitian.....	73
C. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. LKPD Prov. Sumatera Barat 2007- 2010.....	9
2. Daftar Nama SKPD Kota Padang .....	41
3. Skala Pengukuran.....	44
4. Kisi kisi Instrumen Penelitian.....	45
5. Hasil uji validitas <i>pilot test</i> .....	47
6. Hasil uji reliabilitas <i>pilot test</i> .....	48
7. Penyebaran dan pengembalian kuesioner.....	55
8. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin .....	56
9. Jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan .....	56
10. Jumlah responden berdasarkan masa bekerja .....	57
11. Distribusi Frekuensi Variabel kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah.....	58
12. Distribusi Frekuensi Variabel kompetensi staf akuntansi.....	60
13. Deskriptif Statistik.....	62.
14. Uji Validitas.....	63
15. Uji Reliabilitas.....	63
16. Uji Normalitas Residual.....	65
17. Uji F (f-test).....	66
18. <i>Adjusted R Square</i> .....	67
19. Koefisien Regresi Sederhana.....	68

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Konseptual .....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Kuesioner Penelitian.....	
2. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas <i>Pilot Test</i> .....	
3. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Penelitian.....	
4. Uji Asumsi Klasik.....	
5. Pengujian Regresi Sederhana.....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menyusun laporan keuangan merupakan sebuah kewajiban bagi setiap kepala daerah, hal ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara sesuai mekanisme yang ada. Laporan keuangan merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sebuah entitas. Terutama untuk pemerintah daerah, laporan keuangan akan menjadi salah satu bahan penilaian yang penting, karena entitas ini bekerja berdasarkan sebuah anggaran dan realisasi anggaran tersebut tercantum dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk menilai kinerja sebuah pemerintah daerah. Pengguna dari laporan keuangan ini bukan hanya orang-orang dari bidang akuntansi yang dapat memahami laporan keuangan. Penggunanya adalah publik atau semua kalangan, karena uang negara yang dikelola dan digunakan oleh pemerintah daerah itu sebagian besar merupakan uang yang berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat. Oleh karenanya ada sebuah badan yang harus menilai laporan keuangan tersebut dan menginformasikannya kembali kepada publik akan hasil penilaiannya. Dalam hal ini adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang bertindak sebagai penilai laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan membuat instansi pemerintahan harus berbenah diri dalam menjalankan aktifitasnya. Dalam aturan ini dituntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlu dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Menurut Indra (2001:133) karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan pemerintah adalah kemudahannya untuk segera dipahami. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang harusnya dimasukkan dalam laporan keuangan pemerintah, tidak dapat dipublikasikan apabila tidak dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Laporan keuangan merupakan sebuah media informasi akuntansi untuk

menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Agar informasi tersebut dapat bermanfaat bagi para penggunanya, maka sebuah informasi harus dapat memenuhi kualitas tertentu. Begitupun informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi beberapa kriteria yang disebutkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu relevan (*relevance*), handal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*) serta dapat dipahami (*understandability*).

Karakteristik kualitatif informasi yang relevan adalah bahwa informasi tersebut memiliki nilai umpan balik (*feedback value*), prediktif (*predictive value*), dan ketepatan waktu (*timeliness*). Informasi yang memiliki nilai umpan balik adalah informasi yang dapat membantu pemakai mengoreksi harapan-harapan di masa lampau. Lalu, informasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membantu memprediksi atau memperbaiki hasil di masa mendatang. Keandalan dapat diartikan sebagai kualitas yang memungkinkan pengguna data agar dengan yakin mengandalkannya sebagai pencerminan dari apa yang dimaksud untuk disajikan. Jadi, keandalan informasi akan tergantung pada tingkat ketepatan penyajiannya atas suatu peristiwa. Dapat diperbandingkan dapat dijelaskan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 dalam PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan di mana laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami menurut PP No. 24 Tahun 2005 dalam PSAP 01 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan adalah dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Untuk menyusun laporan keuangan diperlukan individu yang ahli di bidang akuntansi. Seperti kita ketahui bersama, dibaginya bidang ilmu menjadi kategori yang khusus adalah untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dengan bidang tersebut. Sehingga terdapat para ahli yang bisa mempergunakan ilmunya agar ilmu tersebut bermanfaat untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu juga dalam bidang keuangan, ada ilmu akuntansi yang harus digunakan oleh yang kompeten dalam bidang ini sehingga tujuan dari entitas pengguna dapat tercapai. Namun, hal ini akan tergantung dari manajemen yang mengelola sumber daya manusia, untuk menempatkan masing-masing individu pada posisi yang tepat dalam suatu entitas.

Di SKPD yang bertugas menyusun laporan keuangan adalah staf akuntansi. Di mana staf akuntansi yang dimaksud adalah staf akuntansi yang menata laporan keuangan atau dapat juga disebut sebagai penatausahaan keuangan SKPD. Staf akuntansi yang menata laporan keuangan dan menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan disampaikan kepada staf akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan

keuangan pemerintah daerah dan disampaikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada kepala daerah.

Menurut Simanjuntak (2007:1) mengemukakan penyiapan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan khususnya staf akuntansi.

Agar implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijalankan dengan baik maka diperlukan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman dan pelatihan yang memadai di bidang akuntansi serta pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan daerah. Dengan adanya kompetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas karena disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah seperti yang dikemukakan Bastian (2006:4).

Suhanda (2007:85) mengemukakan dalam tahap pelaporan staf akuntansi harus mampu menyusun neraca saldo, penyesuaian jurnal dicatat, laporan keuangan dipersiapkan, akun nominal ditutup dan neraca saldo setelah penutupan. Dengan demikian agar informasi laporan yang dihasilkan tersebut berkualitas maka staf akuntansi haruslah menguasai akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Menurut Noor Fuad&Gofur Ahmad (2009:23) kompetensi adalah suatu 'kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang

dipersyaratkan'. Kompetensi erat kaitannya dengan kewenangan. Orang yang berkompoten adalah orang yang memiliki kemampuan sekaligus kewenangan.

Menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.

Bagi pemerintah daerah, pada dasarnya yang harus membuat APBD serta laporan keuangan adalah orang yang berkompoten di bidang tersebut, agar hasil yang dicapai dapat optimal serta dapat tercipta pemerintah daerah yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, ditegaskan bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan berdasarkan prinsip profesionalitas sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras/golongan. Namun pada kenyataannya, posisi pengelola keuangan masih banyak dipegang oleh orang yang di luar kompetensi keuangan. kendala yang dialami dalam proses pelaporan salah satunya adalah minimnya staf yang berlatar belakang akuntansi.

Seperti dinyatakan dalam sebuah jurnal akuntansi keuangan tentang "Peningkatan Kapasitas Akuntan Pemerintah Melalui Standar Kompetensi Akuntan Pemerintah dengan Mengadopsi Sistem Pendidikan Akuntansi yang

mengacu pada *Internasional Education Standard*' Oleh Arie Pratama tahun 2010, bahwa untuk dapat mempertahankan mutu dan kualitas informasi akuntansi, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan staf akuntansi yang memiliki pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan yang cukup. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iman Abdurachman (Universitas Padjadjaran) pada tahun 2009 tentang "Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan informasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah". Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan yaitu sebesar antara Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas informasi Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah.

Buruknya LKPD seperti masalah keterlambatan pelaporan terjadi pada sejumlah daerah di Sumatera Barat di antaranya Solok Selatan tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2007,2008,dan 2009. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), mengatakan bahwa Solok Selatan mendapat opini disclaimer karena minimnya staf akuntansi dalam menyusun LKPD. LKPD yang seharusnya diberikan pada akhir Januari atau pada selambat-lambatnya akhir Maret, baru diserahkan Pemkab Solsel pada Oktober.Bahkan pada tahun 2011 Solok Selatan kembali mendapatkan disclaimer.

Kota Padang juga mendapatkan penilaian WDP dari BPK terkait keterlambatan pelaporan pada tahun 2008 Sampai tahun 2010. Masalahnya adalah keterlambatan pelaporan yang disebabkan ketidakahlian staf akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Selain kelemahan lain yang ditemukan BPK yaitu

kualitas penganggaran, ketidakpatuhan pada undang-undang dan penatausahaan keuangan.

Pada 2009 dalam penyusunan laporan keuangannya, SKPD diberi asistensi atau pendampingan oleh BPKP. Dalam hal ini asas kemandirian belum terlaksana dengan baik pada organisasi SKPD disebabkan faktor staf akuntansi yang kompeten belum memadai. Hal ini dijelaskan juga oleh wakil walikota Padang Mahyeldi bahwa penilaian WDP dan keterlambatan pelaporan keuangan Pemko Padang karena kurang kompetennya staf akuntansi dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Staf akuntansi dianggap masih belum memiliki kemampuan untuk memenuhi amanat beberapa peraturan perundangan lainnya, antara lain PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan terkait lainnya. Sejalan dengan peraturan perundangan tersebut, peningkatan kompetensi SDM aparatur yang bertugas dalam pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan, khususnya untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan fakta mengenai penyusunan laporan keuangan Padang yang belum baik akibat staf akuntansi belum kompeten menjadi alasan peneliti memfokuskan penelitian di Kota Padang.

Berikut data IHPS Prov. Sumatera Barat dari tahun 2007-2010 yang diperoleh dari [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

**Tabel 1**  
**LKPD Prov. Sumatera Barat 2007- 2010**

<b>No</b>	<b>Entitas Pemerintah Daerah</b>	<b>Opini Tahun 2007</b>	<b>Opini Tahun 2008</b>	<b>Opini Tahun 2009</b>	<b>Opini Tahun 2010</b>
<b>1</b>	Prov. Sumatera Barat	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>TMP</b>	<b>WDP</b>
<b>2</b>	Kab. Agam	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>3</b>	Kab. Dharmasraya	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>4</b>	Kab. Kepulauan Mentawai	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>5</b>	Kab. Lima Puluh Kota	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>6</b>	Kab. Padang Pariaman	<b>WDP</b>	<b>WTP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>7</b>	Kab. Pasaman	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>8</b>	Kab. Pasaman Barat	<b>TMP</b>	<b>TMP</b>	<b>TMP</b>	<b>WDP</b>
<b>9</b>	Kab. Pesisir Selatan	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>10</b>	Kab. Sijunjung	<b>TMP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>11</b>	Kab. Solok	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>12</b>	Kab. Solok Selatan	<b>TMP</b>	<b>TMP</b>	<b>TMP</b>	<b>TMP</b>
<b>13</b>	Kab. Tanah Datar	<b>TMP</b>	<b>WDP</b>	<b>WTP</b>	<b>WDP</b>
<b>14</b>	Kota Bukittinggi	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>15</b>	Kota Padang	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>16</b>	Kota Padang Panjang	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>17</b>	Kota Pariaman	<b>WDP</b>	<b>WTP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>18</b>	Kota Payakumbuh	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>19</b>	Kota Sawahlunto	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>
<b>20</b>	Kota Solok	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>

Peneliti termotivasi oleh penelitian Iman Abdurachman (Universitas Padjadjaran) pada tahun 2009 tentang “Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan informasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah”. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan yaitu sebesar antara Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas informasi Laporan Keuangan

Organisasi Pemerintah Daerah. Kemudian ada juga penelitian Indriasari (2008) yang meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah Palembang. Berdasar penelitian terdahulu belum ada kontribusi lainnya yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, misalnya dua informasi lain yang belum diteliti yaitu dapat dibandingkan dan dipahami. Penelitian Iman budiman (2010) meneliti tentang Pengaruh Implementasi Pengendalian Internal Dan Kompetensi PPK-SKPD Terhadap Kualitas informasi Laporan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian membuktikan bahwa implemementasi pengendalian internal dan kompetensi PPKSKPD berpengaruh positif secara simultan sebesar 33,6% dan secara parsial mempunyai pengaruh tidak langsung masing-masing sebesar 19,8% dan 13,8% terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya misal pada penelitian Indriasari (2008) dengan penelitian sekarang terletak pada variable dependen yaitu kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah kota Padang yang difokuskan pada tingkat keterpahaman. Keterpahaman di sini adalah kompetensi sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah yang mulai diterapkan tahun 2005.

Perbedaan dengan penelitian Iman Abdurrahman (2009) di mana Sampel pada Penelitian ini adalah 26 OPD pada Kabupaten Purwakarta menggunakan

metode deskriptif analisis, sedangkan yang menjadi sampel penelitian peneliti adalah 45 SKPD Kota Padang dengan menggunakan metode asosiatif. Selain itu variable independent juga berbeda dimana peneliti memfokuskan penelitian pada kompetensi staf akuntansi.

Perbedaan dengan penelitian Iman budiman (2010) di mana Sampel pada Penelitian ini adalah seluruh SKPD di Tasikmalaya yaitu sebanyak 31 SKPD dengan menggunakan metode deskriptif analitis, alat statistik yang digunakannya adalah analisa jalur (*path analysis*), sedangkan yang menjadi sampel penelitian penulis adalah 45 SKPD Kota Padang dengan menggunakan metode asosiatif .

Berdasarkan fakta dan penelitian terdahulu di atas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian tentang kualitas informasi laporan keuangan yang dipengaruhi oleh kompetensi staf akuntansi pada SKPD Pemerintah Kota Padang. Penelitian ini penulis beri judul **“Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penulisan ini dapat dirumuskan dengan “Sejauhmana pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program strata satu pada Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi instansi pemerintahan, sebagai tambahan referensi bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi.
3. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

###### **a. Pengertian Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Menurut PP No. 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

Menurut Indra (2005:247) secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan

keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau finansial;
- 2) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 3) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan kewajiban serta komitmennya;
- 4) Menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya;
- 5) Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Menurut Desi (2007) harus disadari bahwa ada banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berpaut pada keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi akan bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan

pemerintah adalah: (a) masyarakat; (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa; (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman dan; (d) pemerintah. Pemerintah harus memerhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Deddi, 2006:34).

#### **b. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemilihan metode akuntansi yang tepat, jumlah dan jenis informasi yang harus diungkapkan, serta format penyajiannya melibatkan penentuan alternatif mana yang menyediakan informasi yang paling berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Dalam memilih diantara berbagai alternatif akuntansi keuangan dan pelaporan yang ada, kerangka kerja konseptual FASB (SFAC No. 2) telah mengindikasikan beberapa karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang berguna. Karakteristik kualitatif tersebut adalah: (a) dapat dipahami; (b) relevansi; (c) reliabilitas; dan (d) komparabilitas (Hery, 2009:41).

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan karakteristik kualitatif didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (a) relevan; (b) andal; (c) dapat diperbandingkan dan; (d) dapat dipahami.

### 1) Relevan

FASB menggambarkan relevansi sebagai sesuatu yang dapat membedakan. Informasi keuangan dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi pengambilan keputusan *user*, dengan kata lain mampu membuat beda hasil dari berbagai alternatif keputusan yang ada. Karakteristik kualitatif informasi yang relevan adalah bahwa informasi tersebut memiliki nilai umpan balik (*feedback value*), prediktif (*predictive value*), dan ketepatan waktu (*timeliness*). Informasi yang memiliki nilai umpan balik adalah informasi yang dapat membantu pemakai mengoreksi harapan-harapan di masa lampau. Lalu, informasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membantu memprediksi atau memperbaiki hasil di masa mendatang. Ketepatan waktu berarti bahwa informasi harus tersedia pada saat dibutuhkan, terutama dalam setiap pengambilan keputusan bisnis (Hery, 2009:42).

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan :

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
  - b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d) Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
- 2) Andal

Keandalan dapat diartikan sebagai kualitas yang memungkinkan pengguna data agar dengan yakin mengandalkannya sebagai pencerminan dari apa yang dimaksud untuk disajikan. Jadi, keandalan informasi akan tergantung pada tingkat ketepatan penyajiannya atas suatu peristiwa. Keandalan akan berbeda di antara pengguna, tergantung pada sejauhmana pengetahuan mereka terhadap penggunaan aturan dalam penyediaan informasi. Demikian pula, pengguna yang berbeda dapat mencari informasi dengan tingkat keandalan yang berbeda-

beda. Agar dapat diandalkan, informasi harus dapat diverifikasi, netral, dan disajikan dengan tepat (Belkaoui, 2006 : 239).

Keandalan adalah suatu kualitas informasi yang meyakinkan pengambil keputusan bahwa informasi tersebut mencakup kondisi atau peristiwa yang diwakili. Data yang dapat diandalkan adalah data yang akurat karena didukung dengan bukti yang meyakinkan yang dapat diverifikasi oleh akuntan independen (Hornngren, 1998:11).

Pada umumnya, informasi keuangan mestilah menggambarkan kondisi yang hendak disajikannya. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakai sebagai penyajian jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi akuntansi harus secara jujur menggambarkan apa yang hendak digambarkan, harus lebih objektif, dan dapat dibuktikan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan haruslah tidak tergantung pada penilaian-penilaian subjektif dari pihak-pihak yang menyusunnya (Henry, 2000:557).

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah informasi laporan keuangan yang andal adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengetahuan yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi laporan keuangan yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

Laporan posisi keuangan harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas entitas pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan (Indra, 2001:134).

Ketepatan penyajian mengandung arti bahwa terdapat kesesuaian antara informasi yang dilaporkan dengan hasil-hasil aktual dari aktifitas ekonomi yang diukurnya. Jadi, jumlah-jumlah serta uraian yang terdapat dalam laporan keuangan harus mencerminkan realitas ekonomi dari apa yang disajikan (Smith,1996:40).

b) Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

Dapat diverifikasi mengandung arti akan adanya konsensus dan tidak adanya bias dari si pengukur. Informasi yang dapat diverifikasi bisa diproduksi kembali secara substansial oleh pengukur-pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Kemampuan untuk dapat diverifikasi mengacu hanya pada kebenaran dari informasi yang dihasilkan,

bukannya ketepatan dari metode pengukuran yang digunakan. Dengan kata lain informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh (Belkaoui,2006:239).

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Netralitas maksudnya informasi harus dapat diarahkan pada kebutuhan pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan (Indra,2001:134).

Netralitas berkenaan dengan tidak adanya bias dalam penyajian dari laporan atau informasi akuntansi. Jadi informasi yang netral adalah yang bebas dari bias yang mengarahkan kepada hasil yang diinginkan atau mempengaruhi metode perilaku tertentu. Hal ini bukan berarti bahwa pembuat informasi tidak memiliki tujuan dalam pikirannya ketika menyiapkan laporan tersebut, pembuat informasi bertujuan bahwa maksud dari informasi hendaknya tidak mempengaruhi suatu hasil yang telah ditentukan sebelumnya (Belkaoui,2006:239).

### 3) Dapat diperbandingkan

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### 4) Dapat dipahami

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Hery (2009:42) pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional

perusahaan lewat pelaporan keuangan. informasi akan berkualitas (berguna) jika informasi tersebut mudah dipahami oleh pemakai atau para pengambil keputusan.

## **2.Kompetensi Staf Akuntansi**

### **a.Pengertian Kompetensi Staf Akuntansi**

Pada dasarnya setiap manusia diciptakan dengan berbagai kemampuan yang melekat padanya untuk dapat mempertahankan hidupnya dan menyelesaikan persoalan yang ada disekelilingnya. Kemampuan antara manusia yang satu dan yang lainnya berbeda-beda, ketika beberapa kemampuan yang melekat tersebut dikombinasikan dan dengannya dapat dicapai suatu kinerja yang optimal, maka kemampuan itu dapat dikatakan sebagai sebuah kompetensi. Kemampuan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber misalnya latar belakang pendidikan atau organisasi, atau sifat bawaan yang sudah melekat dalam diri seseorang. Adapun beberapa pengertian kompetensi dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) pengertian ‘kompetensi adalah kemampuan, kecakapan’. Kompetensi sumber daya manusia dalam arti sempit, tidak dapat dilepaskan dari persyaratan pekerjaan yang ada. Artinya, organisasi harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana pekerjaan itu harus dilaksanakan dan kompetensi apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Kompetensi ini bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku aparatur.

Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998) (dalam Ismar Rosidi, 2009) kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior. Aspek-aspek pribadi ini termasuk sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi-kompetensi akan mengarahkan tingkah laku. Sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja.

Watson Wyatt (2003:106) selanjutnya mendefenisikan '*competence* sebagai kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan perilaku (*attitude*)'. Keterampilan, pengetahuan, dan perilaku itu dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya.

Menurut Noor Fuad & Gofur Ahmad (2009:22), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini staf akuntansi melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah suatu ‘kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan’. Kompetensi erat kaitannya dengan kewenangan. Orang yang berkompoten adalah orang yang memiliki kemampuan sekaligus kewenangan.

Menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.

Berdasarkan definisi kompetensi, dapat disimpulkan bahwa tidak semua aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja itu merupakan kompetensi. Hanya aspek aspek pribadi yang mendorong dirinya untuk mencapai kinerja superiorlah yang merupakan kompetensi yang dimilikinya. Oleh karenanya kompetensi memiliki karakteristik tertentu.

Noor Fuad &Gofur Ahmad (2009:24) mengemukakan beberapa jenis karakteristik yang membentuk sebuah kompetensi, yakni sebagai berikut:

*a. Motives*

*Motives* merupakan konsistensi berpikir mengenai sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki oleh seseorang sehingga menyebabkan suatu kejadian. Motif tingkah laku dapat dijabarkan dengan istilah

tertentu, seperti mengendalikan, mengarahkan, membimbing, memilih untuk menghadapi kejadian atau tujuan tertentu

*b. Traits*

*Traits* adalah karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap informasi atau situasi tertentu.

*c. Self Concept*

*Self concept* merupakan sikap, nilai, atau imajinasi seseorang.

*d. Knowledge*

*Knowledge* merupakan informasi seseorang dalam lingkup tertentu. Komponen kompetensi ini sangat kompleks. Nilai dari *knowledge test* sering gagal untuk memprediksi kinerja karena terjadi kegagalan dalam mengukur pengetahuan dan kemampuan sesungguhnya yang diperlakukan dalam pekerjaan

*e. Skill*

*Skills* merupakan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas fisik atau mental tertentu.

## **b. Klasifikasi Kompetensi**

Berdasarkan putusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil mengelompokkan jenis kompetensi berdasarkan dua kelompok, yakni kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

Kompetensi Dasar adalah ‘Kompetensi yang wajib atau mutlak harus dimiliki oleh setiap PNS yang menduduki jabatan structural (pejabat struktural) di lingkungan Instansi Pemerintah’. Kompetensi Dasar yang harus dimiliki tersebut terdiri atas:

- a. Integritas (*integrity*)
- b. Kepemimpinan (*leadership*)
- c. Perencanaan dan Pengorganisasian (*planning and organizing*)
- d. Kerja sama (*Collaboration*)
- e. Fleksibilitas (*Flexibility*)

Kompetensi bidang adalah ‘kompetensi yang diperlukan oleh setiap PNS yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan bidang tugas/pekerjaan yang jadi tanggung jawabnya’. Penetapan kompetensi bidang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan itu masing-masing. Penerapannya dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi terhadap ruang lingkup pekerjaan yang tertulis di dalam TUPOKSI (Tugas Pokok Dan Fungsi) jabatan.

### **c. Kompetensi Staf Akuntansi Pemerintah Daerah**

Menurut Simanjuntak (2007:1) mengemukakan penyiapan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan khususnya staf akuntansi.

Agar implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijalankan dengan baik maka diperlukan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman dan pelatihan yang memadai di bidang akuntansi serta pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan daerah. Dengan adanya kompetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan

keuangan yang berkualitas karena disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (Bastian,2006:4).

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang akuntan pemerintah daerah disebutkan juga oleh Siti Sandang dalam Konvensi Nasional Akuntansi VI 2009, dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan akuntansi yang ditetapkan oleh IFAC (*International Federation of Accountants*), yakni IES (*International Education Standards*, dalam hal ini IES 2, IES 3 dan IES 4 yang mencakup dimensi *knowledge, skills dan attitude*. Berikut pemaparannya:

*Knowledge*

- a. Ilmu akuntansi, keuangan dan ilmu pengetahuan terkait lainnya
- b. Pengetahuan mengenai kegiatan bisnis/sector publik dan pengorganisasian
- c. Pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi

*Skills*

- a. *Technical &functional skills*
- b. *Intellectual skills*
- c. *Organizational skills*
- d. *Personal skills*
- e. *Interpersonal & communication skills*

*Attitude*

Memiliki komitmen untuk:

- a. Kepentingan publik dan sensitifitas terhadap tanggung jawab sosial
- b. Pengembangan diri dan belajar secara terus menerus
- c. Dapat diandalkan, bertanggungjawab, tepat waktu dan saling menghargai
- d. Hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam SPAP (2008 : 14) dijelaskan beberapa prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian yang harus dimiliki seorang akuntan, yaitu :

1. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mewajibkan setiap praktisi untuk:
  - a. Memelihara pengetahuan serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja; dan
  - b. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.
2. Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut:
  - a. Pencapaian kompetensi profesional; dan
  - b. Pemeliharaan kompetensi profesional.
3. Pemeliharaan kompetensi professional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan professional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional.

4. Sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan.
5. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kapasitas profesional.
6. Bila dipandang perlu, praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa profesional yang diberikan kepada klien, pemberi kerja atau pengguna jasa profesional lainnya untuk menghindari terjadinya kesalahtafsiran atas pernyataan pendapat yang terkait dengan jasa profesional yang diberikan.

Kompetensi tersebut harus dimiliki oleh para akuntan pemerintah yakni staf akuntansi yang menjalankan fungsi akuntansi atau keuangan pada lembaga pemerintah.

### **B. Penelitian Relevan**

Berdasarkan beberapa penelitian laporan penelitian terdahulu, penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Iman Abdurachman (2009) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas informasi Laporan Keuangan organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan Terdapat pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 32,9% antara Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas informasi Laporan Keuangan

Organisasi Pemerintah Daerah. Sampel pada Penelitian ini adalah 26 OPD pada Kabupaten Purwakarta menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian Fardila (2008), yang meneliti mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintahan kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemko Padang secara implisit belum mampu menerapkan SAP. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya dinas di kota Padang yang belum selesai dalam menyusun laporan keuangan. Serta adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang yaitu sumber daya manusia yang bukan dari akuntansi dan kurangnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pemko Padang. Sampel penelitian ini adalah 45 SKPD Kota Padang dengan menggunakan metode asosiatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Indiasari, *et al* (2008) pada Kota Palembang dan Ogan Hilir yang meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi (yaitu keterandalan dan keterpahaman) pelaporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi. Sedangkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Iman Budiman (2010) meneliti tentang Pengaruh Implementasi Pengendalian Internal Dan Kompetensi PPK-SKPD Terhadap Kualitas informasi

Laporan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian membuktikan bahwa implemementasi pengendalian internal dan kompetensi PPK-SKPD berpengaruh positif secara simultan sebesar 33,6% dan secara parsial mempunyai pengaruh tidak langsung masing-masing sebesar 19,8% dan 13,8% terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sampel pada Penelitian ini adalah seluruh SKPD di Tasikmalaya yaitu sebanyak 31 SKPD dengan menggunakan metode deskriptif analitis, alat statistik yang digunakannya adalah analisa jalur (*path analysis*).

Arie Pratama (2010) meneliti tentang Peningkatan Kapasitas Akuntan Pemerintah Melalui Standar Kompetensi Akuntan Pemerintah dengan Mengadopsi Sistem Pendidikan Akuntansi yang Mengacu pada International Education Standard. Hasil penelitiannya menunjukkan di Pemerintahan Indonesia, kondisi staf akuntansi sangat memprihatinkan yang ditunjukkan dengan pengelola keuangan belum memiliki kompetensi yang memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi-kualitatif, objek penelitiannya adalah kompetensi akuntan di pemerintah dan penyusunan standar akuntan pemerintah.

Asep Sudrajat (2009) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten/Kota Wilayah IV Propinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas kompetensi teknik (X<sub>1</sub>), konseptual (X<sub>3</sub>) secara simultan berpengaruh yaitu sebesar

52,2%. Sampel pada Penelitian ini adalah 84 SKPD yang ada di Kabupaten/Kota Wilayah IV Propinsi Jawa Barat, dengan menggunakan metode deskriptif analitis, alat statistik yang digunakannya adalah analisa jalur (*path analysis*).

Zaenal Fanani (2009) meneliti tentang Kualitas Pelaporan Keuangan: Berbagai Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonomis. Penelitian ini salah satu hasilnya menunjukkan bahwa kinerja perusahaan merupakan salah satu faktor signifikan yang menunjukkan hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif yang dilakukan pada tahun 2001-2006, yang menjadi sampel adalah perusahaan manufaktur.

Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia subbagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono & Fidelis (2004), Dinata (2004), Imelda (2005). Temuan empiris dari penelitian mereka menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya *job description*, dan belum dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada Pemerintah Kota Palembang, atau Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau

tidak memiliki nilai, salah satunya keterandalan sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan masih lemahnya kualitas informasi laporan keuangan dari pemerintah, karena belum memadainya kompetensi staf akuntansi untuk mengelola laporan keuangan di Pemerintahan.

### **C. Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Hubungan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Setiap organisasi memiliki tujuan yang dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Hal ini juga berlaku untuk bagian keuangan pada setiap SKPD, tujuan bagian ini adalah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang merupakan salah satu media penyampaian informasi, dengan kualitas yang baik agar dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Dengan demikian, bagian tersebut harus diisi orang yang tepat, yaitu staf akuntansi yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan, sehingga dapat tercapainya tujuan, yaitu informasi laporan keuangan yang berkualitas baik, yang dapat bermanfaat bagi para penggunanya.

PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah terkait dengan perubahan dalam sistem penganggaran, baik proses penganggarannya maupun bentuk dan struktur APBD. Perubahan tersebut

merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik dan teknis operasional diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006).

Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia subbagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono & Fidelis (2004), Dinata (2004), Imelda (2005). Temuan empiris dari penelitian mereka menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya *job description*, dan belum dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada Pemerintah Kota Palembang, atau Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya keterandalan sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut

peneliti menyimpulkan terdapat hubungan positif antara kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Sudah selayaknya setiap entitas ataupun sebuah organisasi membuat sebuah bentuk pertanggungjawaban atas apa saja kegiatan yang telah dilakukannya dan bagaimana penggunaan sumber daya yang ada, baik yang berbentuk materil ataupun non materil. Untuk sumber daya non materil pertanggungjawabannya dapat berupa laporan efektifitas kegiatan. Sedangkan untuk penggunaan sumber daya materil, pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu bahan evaluasi atas penggunaan sumber daya yang ada, apakah sudah efektif atau belum. Selain itu, pertanggungjawaban tersebut dapat dijadikan bahan penilaian terhadap efektifitas dan efisisensi entitas tersebut. Laporan keuangan bisa menjadi salah satu media informasi terkait dengan penggunaan dan pengelolaan dana, yang selanjutnya dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi entitas tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang di ungkapkan oleh Mardiasmo (2002:159) dalam bukunya mengatakan bahwa akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Jadi laporan keuangan sudah seharusnya menjadi media pertanggungjawaban yang memiliki kualitas informasi

yang baik sehingga bisa bermanfaat bagi pengambilan keputusan para penggunanya.

Sama halnya pada pemerintah daerah yang merupakan sebuah unit organisasi yang melakukan kegiatan atau yang beroperasi untuk kepentingan publik. Sumber dana yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagian besar berasal dari masyarakat, hasil pengelolaan keuangan tersebut juga akan ditunjukan bagi kepentingan masyarakat. Sehingga proses pertanggungjawaban menjadi sangat penting dan menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan serta menerapkan SAP dalam PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Seperti sudah dikatakan sebelumnya, bahwa laporan keuangan harus memiliki kualitas informasi yang baik, begitupun untuk laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan publik serta akan menjadi salah satu bahan penilaian kinerja dari pemerintah daerah yang lebih jauh lagi dapat mempengaruhi pencitraan pemerintah daerah sendiri di masyarakat dan pemerintah daerah lainnya.

Oleh karena pentingnya informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang akan disajikan tersebut, maka laporan keuangan pemerintah daerah ini harus memenuhi kualifikasi tertentu yang tercantum dalam SAP. Karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan tersebut dikatakan baik yang sesuai dengan SAP yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005

yang sekarang telah berubah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 adalah relevan, handal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Diharapkan setelah memenuhi karakteristik tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas sehingga dapat benar-benar bermanfaat bagi para penggunanya dan memberikan pencitraan yang positif bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

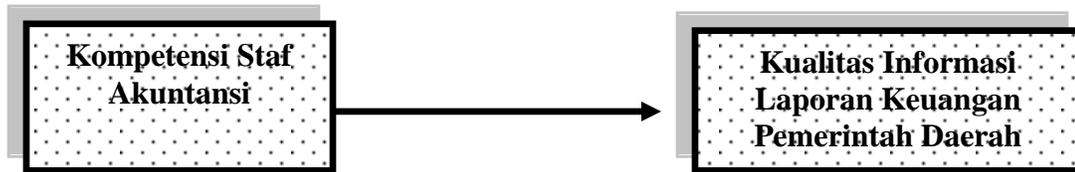
Untuk mencapai kualitas tersebut, maka laporan keuangan ini harus dibuat oleh orang yang berkompeten di bidangnya, yang terkait dengan pembuatan laporan keuangan ini adalah staf akuntansi yang bertugas menjalankan semua siklus pencatatan sampai akhirnya menjadi sebuah laporan keuangan. Adapun pengertian kompetensi staf akuntansi sendiri menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 ditentukan bahwa

“kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.”

Jadi staf akuntansi ini harus memiliki kompetensi tertentu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang tentunya dapat mendukung pelaksanaan tugasnya dalam membuat laporan keuangan yang baik. Begitupun yang dinyatakan Siti Sandang dalam Konvensi Nasional Akuntansi bahwa Akuntan Pemerintah Daerah harus memiliki tiga kompetensi yang meliputi *knowledge*, *skill* dan *attitude* yang terkait dengan akuntansi. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip manajemen yaitu “*the right man in the right place*”

sehingga, setiap bagian dalam sebuah entitas haruslah diduduki oleh orang yang tepat, agar dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan harapan. Disamping itu, terdapat sebuah penelitian yang dilakukan Iman Abdurahman tentang “Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah”. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi aparatur terhadap kualitas informasi laporan keuangan organisasi pemerintah daerah. Seperti dikatakan pula dalam sebuah jurnal akuntansi keuangan tentang “Peningkatan Kapasitas Akuntan Pemerintah Melalui Standar Kompetensi Akuntan Pemerintah dengan Mengadopsi Sistem Pendidikan Akuntansi yang mengacu pada *Internasional Education Standard*” Oleh Arie Pratama tahun 2010 bahwa untuk dapat mempertahankan mutu dan kualitas informasi akuntansi, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan staf akuntansi sehingga memiliki pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan yang cukup. Hal ini semakin menguatkan adanya hubungan antara kompetensi staf akuntansi dan kualitas informasi laporan keuangan yang akan dihasilkan.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:



**Gambar 1 Kerangka Konseptual**

### **E. Hipotesis**

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut :

H<sub>0</sub>: Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kompetensi staf akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin baik kompetensi staf akuntansi semakin baik kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.

#### **B. Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih terbatas pada kompetensi staf akuntansi. Sehingga variabel penelitian yang digunakan masih kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

### **C. Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. SKPD agar meningkatkan kompetensi staf akuntansi melalui pelatihan-pelatihan yang intensif. Hal ini bertujuan agar staf akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang tinggi, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penggunanya.
2. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.
3. Penelitian ini masih terbatas pada kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.